

# PERAN KODIM 0609/KAB. BANDUNG DALAM TANGGAP DARURAT PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG

## THE ROLE OF KODIM 0609/KAB. IN BANDUNG NATURAL DISASTER EMERGENCY RESPONSE IN THE AREA OF BANDUNG REGENCY

Andy Setio Untoro<sup>1</sup>, Agus Subagyo<sup>2</sup>, Mitro Prihantoro<sup>3</sup>

Program Studi Strategi Pertahanan Darat Universitas Pertahanan

([andysetio04@gmail.com](mailto:andysetio04@gmail.com), [subagyoeti@yahoo.com](mailto:subagyoeti@yahoo.com), [mitrop91@gmail.com](mailto:mitrop91@gmail.com))

**Abstrak** -- Kodim 0609/Kab. Bandung sebagai bagian integral dari TNI dibangun untuk dapat melaksanakan tugas pertahanan negara di darat. Sebagai lembaga yang mempunyai mandat koordinasi, komando dan pelaksana penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Bandung, Kodim 0609/Kab. Bandung berusaha merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana sehingga terwujud masyarakat yang tangguh terhadap bencana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran, kendala dan upaya Kodim 0609/Kab. Bandung dalam rangka meningkatkan tanggap darurat penanggulangan bencana alam di wilayah Kabupaten Bandung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan reduksi data, display data dan kesimpulan data. Lokasi penelitian di Kabupaten Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Peran dan tugas Kodim 0609/Kab. Bandung telah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan jabatan yang diembannya. 2) Kendala yang dihadapi meliputi sinergitas, fungsi komando, luas wilayah, protap penanggulangan bencana dan ego sektoral. 3) Upaya yang dilakukan Kodim 0609/Kab. Bandung meliputi: menyiagakan pasukan dan logistik, peningkatan mitigasi dan kesiapsiagaan serta penentuan titik pengungsian.

**Kata kunci:** peran, tanggap darurat, bencana alam

**Abstract** -- KODIM 0609/Kab. Bandung as an integral part of the TNI was built to be able to perform the duties of the State Defense on land. As the agency that has the mandate of coordinating, implementing command and disaster relief in the area of Bandung Regency, Kodim 0609/Kab. Bandung attempt formulated and set policy and disaster relief strategies so as to materialize the formidable community against disasters. This research aims to analyze the role, constraints and efforts of Kodim 0609/Kab. Bandung in order to improve natural disaster relief emergency response in the area of Bandung Regency. This study uses qualitative methods. The data obtained through observation, interview and the study of librarianship. Data analysis techniques used for data reduction, display the data and the conclusions of the data. Research on location of Bandung Regency. The results showed that: 1) role and Kodim task 0609/Kab. Bandung has been in accordance with the duties and responsibilities in accordance with the position that he would hold. 2) obstacles faced include synergy, the function command, area, protap penanggulangan ego and sectoral disaster.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Strategi Pertahanan Darat Cohort 5 Universitas Pertahanan

<sup>2</sup> Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jenderal Ahmad Yani

<sup>3</sup> Lektor Ilmu Ketahanan Nasional Program Studi Strategi Pertahanan Darat Universitas Pertahanan

3) efforts made Kodim 0609/Kab. Bandung include: dna raised an army logistics, increased mitigation and preparedness and determination of evacuation point.

**Key words: role, emergency response, natural disasters**

## Latar Belakang

**T**NI AD memiliki komitmen yang tinggi dalam mengatasi musibah bencana alam, dimana dalam penyelenggaraannya membutuhkan kemampuan personel yang mampu bergerak cepat dan dilengkapi peralatan untuk melewati medan yang berat dan sulit. Dengan demikian diperlukan mekanisme yang efektif terkait dengan peran optimal militer dalam penanganan bencana alam. Mekanisme tersebut antara lain mencakup tata kelola, standarisasi sistem dan peralatan militer yang secepat mungkin bisa dioperasionalkan untuk menangani bencana alam.

Mengacu kepada Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 pada pasal 7 ayat 1 tercantum tentang Tugas Pokok TNI. Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap

keutuhan bangsa dan negara. Tugas pokok TNI tersebut seperti tercantum pada pasal 2, dilakukan dengan melaksanakan Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Bencana merupakan kejadian yang disebabkan oleh alam maupun oleh kelalaian manusia. Tanah longsor, gempa bumi, angin puting beliung, tsunami, banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, kekeringan serta gelombang pasang adalah bencana yang disebabkan oleh alam. Sedangkan aksi teror, konflik, kecelakaan industri, kecelakaan transportasi, dan kebakaran hutan merupakan bencana akibat kelalaian manusia. Bencana yang disebabkan oleh alam dan kelalaian manusia sama-sama dapat menimbulkan kerugian terhadap lingkungan dan perekonomian.

Konsep pengerahan tenaga bantuan TNI AD dalam rangka menanggulangi bencana alam di daerah perlu dirumuskan tujuan dan sasaran agar dapat diperoleh hasil yang optimal. Oleh sebab itu perlu disusun tujuan program dari pemberian bantuan yaitu dengan cara meningkatkan potensi yang dimiliki

prajurit TNI dan memperkuat hubungan antara Satuan Komando Kewilayahan dengan segenap komponen bangsa di daerah dalam usaha membangun kesadaran mitigasi bencana alam untuk kepentingan Pertahanan Negara. Sasaran yang ingin dicapai tersebut dirumuskan ke dalam tiga tahapan penanggulangan bencana alam yakni tahap pra bencana, masa tanggap darurat dan pasca bencana.

Pada bulan maret 2018, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung pernah meningkatkan status daerah bencana alam banjir dan longsor, dari siaga bencana menjadi tanggap darurat bencana, hal itu disebabkan tingginya curah hujan di wilayah Kabupaten Bandung. Sebagian wilayah yang terkena musibah banjir dan tanah longsor menyebabkan korban bencana hingga mencapai 113.000 jiwa serta terdapat 2.225 jiwa yang mengungsi di 22 titik pengungsian yang tersebar di tiga kecamatan yakni Dayeuhkolot, Baleendah, dan Bojongsoang.<sup>4</sup>

Berdasarkan informasi BPBD Kabupaten Bandung Tahun 2017,

diketahui bahwa wilayah yang sering mendapat banjir diantaranya Kecamatan Majalaya, Kecamatan Bojongsoang, Kecamatan Baleendah, Kecamatan Banjaran dan Kecamatan Dayeuhkolot.

Kondisi letak geografis Kabupaten Bandung yang berupa dataran tinggi berbentuk cekungan dikombinasikan dengan banyaknya alih fungsi lahan yang terjadi baik dari pertanian dan daerah resapan menjadi permukiman maupun kawasan hutan menjadi lahan pertanian musiman menyebabkan tingginya sedimentasi dan bencana banjir.

Selain itu terganggunya sistem jaringan irigasi dan drainase juga mengakibatkan timbulnya genangan banjir di beberapa titik lokasi wilayah pemukiman seperti banjir di Cieunteung-Baleendah, Dayeuhkolot serta jalan terusan Kopo. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh status daerah pada lokasi-lokasi tersebut yang merupakan daerah pelepasan air tanah, sehingga air tidak dapat terserap di daerah tersebut. Tingkat banjir dengan status tinggi terdapat di Kecamatan Dayeuhkolot, Kecamatan Bojongsoang, dan Kecamatan Baleendah.

Selain resiko bencana banjir dan gunung berapi, Kabupaten Bandung juga rawan terhadap bencana gempa bumi.

---

<sup>4</sup> <http://jabar.tribunnews.com/2018/03/14/bpbd-kabupaten-bandung-bencana-tahun-ini-lebih-parah-dari-tahun-sebelumnya>

Tingkat resiko bencana ini cukup tinggi karena sebagian besar luas wilayah Kabupaten Bandung memiliki tingkat kerentanan gempa yang tinggi dan sebagian lainnya memiliki tingkat kerentanan menengah.

Tingkat kerentanan gempa dengan status tinggi berada di Kecamatan Rancabali, Kecamatan Pasirjambu, Kecamatan Pangalengan, Kecamatan Cimaung, Kecamatan Banjaran, Kecamatan Ibum, Kecamatan Cikancung, Kecamatan Cicalengka, dan sebagian Kecamatan Rancaekek. Sementara kecamatan lainnya berada pada tingkat kerentanan gempa dengan status menengah.

Bencana lainnya yang berpotensi terjadi di Kabupaten Bandung adalah resiko pergeseran tanah mengingat topografi dan kontur wilayah yang berbukit-bukit dengan perbedaan ketinggian dataran memiliki rentang yang cukup lebar. Kawasan rawan pergeseran tanah tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bandung, mulai dari bagian utara dengan tingkat kerentanan gerakan tanah sangat rendah, menuju bagian tengah dan selatan Kabupaten Bandung yang memiliki tingkat kerentanan rendah dan menengah, serta beberapa kawasan

di bagian selatan yang memiliki tingkat kerentanan pergeseran tanah tinggi.<sup>5</sup>

Menyikapi kerawanan bencana alam yang frekuensinya terus meningkat setiap tahun, perlu ditetapkannya kebijakan dan strategi penanggulangan bencana dengan memprioritaskan seluruh upaya-upaya pengurangan resiko bencana di dalam pembangunan nasional dan daerah.

Sebagai lembaga yang mempunyai mandat koordinasi komando dan pelaksana penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Bandung, BPBD dengan dukungan dari para pemangku kepentingan salah satunya yaitu Kodim 0609/Kab. Bandung berusaha merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana agar seluruh upaya-upaya lintas sektor dan lintas tingkatan dapat direncanakan serta diimplementasikan secara terpadu, terarah dan terukur sehingga terwujud masyarakat dan kondisi bangsa yang tangguh.

Sebagai Satuan Komando Kewilayahan TNI, Kodim 0609/Kab. Bandung memiliki kewajiban untuk dapat melaksanakan tugas mewujudkan pertahanan negara di darat yang

---

<sup>5</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021.

dihadapkan kepada tantangan tugas semakin kompleks termasuk di dalamnya adalah tugas dalam menanggulangi terjadinya bencana alam.

### **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Penentuan subjek penelitian dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung. Sedangkan yang menjadi subyek penelitian adalah Personel Kodim 0609/Kabupaten Bandung, staf BPBD dan tokoh masyarakat.

Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan yaitu non probability sampling dengan teknik *purposive sampling* karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, peneliti memilih teknik Purposive Sampling yang menetapkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Dandim 0609/Kabupaten Bandung sebagai key informan, Pasiter Kodim 0609/Kabupaten Bandung sebagai informan pendukung, Pasi Inteldim 0609/Kabupaten Bandung

sebagai informan pendukung, Kabankesbangpol sebagai informan pendukung, Staf BPBD sebagai informan pendukung, tokoh masyarakat sebagai informan pendukung

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Untuk melaksanakan analisis data hasil penelitian, peneliti menggunakan analisis data model Miles dan Huberman dengan langkah-langkah sebagai berikut: Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan.

### **Peran Kodim 0609/Kab. Bandung Dalam Tanggap Darurat Bencana**

Tanggap darurat bencana yaitu serangkaian tindakan yang diambil secara cepat menyusul terjadinya suatu peristiwa bencana, termasuk penilaian kerusakan, kebutuhan (*damage and needs assessment*), penyaluran bantuan darurat, upaya pertolongan, dan pembersihan lokasi bencana. Tahapan yang paling penting dalam manajemen bencana ketika bencana itu terjadi yaitu tanggap darurat.

Tanggap darurat merupakan upaya yang dilakukan dengan segera ketika bencana terjadi, untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan. Selama

kegiatan tanggap darurat hal yang dilakukan adalah menanggulangi bencana sesuai dengan sifat dan jenisnya. Tim tanggap darurat diharapkan mampu menanggulangi berbagai macam bentuk bencana, oleh karena itu tim tanggap darurat harus diorganisir dan dirancang dalam menangani berbagai jenis bencana.<sup>6</sup>

Tujuan penyelenggaraan tanggap darurat bencana yaitu menyelamatkan kelangsungan kehidupan manusia, mengurangi penderitaan korban bencana dan meminimalkan kerugian material. Keberhasilan pencapaian tujuan dipengaruhi oleh dua faktor yaitu: informasi dan sumber daya. Seberapa banyak informasi yang diperoleh berkaitan bencana dan akibat yang ditimbulkan akan berbanding lurus dengan kebutuhan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi dan sumber daya lokal.

Selama proses pelaksanaan penanganan tanggap darurat, kondisi pada saat bencana terjadi dapat diklasifikasikan ke dalam 3 periode, yaitu:

a. Periode Panik

Pada periode ini terjadi suasana panik, kacau balau, bingung, saling menyalahkan dan situasi yang mencekam. Semua pihak berada pada posisi ragu-ragu atau bahkan takut untuk berbuat sesuatu. Informasi yang sulit untuk diperoleh, sumber yang tidak jelas, sarana komunikasi untuk memperoleh sumber yang dapat dipercaya pun rusak serta prasarana dan sarana vital hancur.

b. Periode Darurat – Terkendali.

Pada periode ini situasi panik sudah mulai reda. Masyarakat sudah memperoleh informasi dari berbagai sumber sehingga ketegangan atau situasi mencekam secara perlahan mereda. Masyarakat sudah bisa berbuat sesuatu minimal untuk menolong dirinya sendiri. Pada periode ini juga hasil pendataan cakupan luas dampak, jumlah korban bencana, kerusakan fisik dan pendataan pada aspek lain sudah dapat dijadikan acuan untuk melakukan tanggap darurat secara baik dan terarah.

c. Periode Darurat Lanjutan.

Pada periode darurat lanjutan ini kondisi darurat sudah berakhir menuju kondisi normal. Masyarakat secara perlahan sudah dapat melaksanakan kegiatan social ekonomi meskipun

---

<sup>6</sup> Soehatman Ramli, Pedoman Praktis Manajemen Bencana (Disaster Manajemen), (Jakarta : Dian Rakyat, 2010), hlm. 29

secara terbatas. Pada periode ini kegiatannya mencakup percepatan dan penuntasan penanganan darurat serta pengakhiran pemulihan darurat, sekaligus mempersiapkan pemulihan pasca-bencana yang berada pada posisi transisi.<sup>7</sup>

Keterlibatan Kodim 0609/Kab.Bandung dalam penanggulangan bencana dirasa penting mengingat fungsi TNI dalam tugas pokok Operasi Militer Selain Perang (OMSP), TNI berperan dalam membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan.

Sebagai Satuan Komando Kewilayahan, Kodim 0609/Kab. Bandung selaku Badan Pelaksana Korem 062/Tarumanagara selain melaksanakan tugas pembinaan teritorial juga melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 melalui pola-pola operasi kemanusiaan (Civic Mission) bersama aparat pemerintahan, masyarakat dan stake holder yang ada dengan tujuan untuk menciptakan ketahanan wilayah di kawasan rawan

bencana dan ketahanan wilayah Kabupaten Bandung.

Pada tahap tanggap darurat, Kodim 0609/Kab.Bandung sudah berperan bersama-sama dengan instansi terkait sesuai fungsi dan tugas yang diatur oleh BPBD Kabupaten Bandung dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

Kegiatan karya bhakti dilaksanakan dengan melibatkan seluruh unsur Kodim dan dikoordinir oleh Dansat Kowil dalam rangka mengurangi dampak bencana bagi masyarakat korban bencana. Kegiatan yang dilakukan antara lain: memberikan pertolongan pertama (evakuasi) kepada korban bencana, menyiapkan tempat dan dapur umum serta Rumah Sakit lapangan, menyiapkan tempat penampungan/pengungsian sementara bagi korban bencana (balai desa, balai kecamatan, sekolah-sekolah, gudang-gudang dan lain-lain), mengamankan daerah yang terkena bencana, menginventarisir dan menerima serta menyalurkan bantuan dan mempertanggungjawabkan bantuan yang diterima serta melaporkannya kepada Komando Atas.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tahap tanggap darurat antara lain: Ketersediaan sarana evakuasi berupa kendaraan truck,

---

<sup>7</sup> Nurjanah,dkk., Op.cit., hlm. 61-63.

sehingga praktis hanya mengandalkan kesiapan kendaraan yang tersedia di Kodim 0609/Kab. Bandung. Belum tersedianya sarana komunikasi yang memadai untuk menjangkau seluruh Koramil jajaran terutama di daerah rawan bencana menyebabkan pemantauan situasi wilayah yang terkena bencana banjir dan tanah longsor sangat terbatas.

Keberadaan Kodim dalam upaya penanganan terjadinya korban bencana alam adalah bersifat perbantuan. Dengan demikian, Kodim tidak memiliki kewenangan secara penuh untuk membuat keputusan di lapangan. Namun demikian Kodim 0609/Kab. Bandung memiliki peran besar untuk menyegerakan perbantuan terhadap korban bencana alam.

Oleh sebab itu dibutuhkan suatu koordinasi untuk mewujudkan upaya optimalisasi penanggulangan bencana alam. Dibutuhkan suatu konsep strategis tentang aplikasi metode pembinaan teritorial (Binter) dalam usahanya melakukan tanggap darurat penanganan bencana alam oleh Satuan Komando Kewilayahan.

### **Kendala Tanggap Darurat Bencana**

Menurut Nurjanah, bencana merefleksikan karakteristik tentang

gangguan terhadap pola hidup manusia, dampak bencana bagi manusia, dampak terhadap struktur sosial, kerusakan pada aspek sistem pemerintahan, bangunan dan lain-lain serta kebutuhan masyarakat yang diakibatkan oleh bencana.<sup>8</sup>

Priambodo mendefinisikan bencana sebagai suatu kejadian alam, buatan manusia, atau perpaduan antara keduanya yang terjadi secara tiba-tiba sehingga menimbulkan dampak negatif yang dahsyat bagi kelangsungan kehidupan. Dalam kejadian tersebut, unsur yang terkait langsung atau terpengaruh harus merespons dengan melakukan tindakan luar biasa guna menyesuaikan sekaligus memulihkan kondisi seperti semula atau menjadi lebih baik.<sup>9</sup>

Bencana merupakan peristiwa yang terjadi karena bertemunya ancaman dari luar terhadap kehidupan manusia dengan kerentanan, yaitu kondisi yang melemahkan masyarakat untuk menangani bencana alam. Singkatnya ketika ancaman berdampak merugikan manusia dan lingkungan dan tidak adanya kemampuan masyarakat untuk menanggulangnya. Bencana alam adalah

---

<sup>8</sup> Nurjanah, dkk., Manajemen Bencana, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 10.

<sup>9</sup> Arie S. Priambodo, Panduan Praktis Menghadapi Bencana, (Yogyakarta: Kansius, 2013), hlm. 22.



situasi yang disebabkan oleh peristiwa alam di luar dengan daya kemampuan manusia sehingga orang banyak terjerumus ke dalam keadaan tidak berdaya, menimbulkan korban, kerugian, penderitaan hidup, dan kehidupan. Bencana alam adalah konsekuensi dari kombinasi aktivitas alami (suatu peristiwa fisik, seperti letusan gunung, gempa bumi, tanah longsor) dan aktivitas manusia. Karena ketidakberdayaan manusia, akibat kurang baiknya manajemen keadaan darurat menyebabkan kerugian dalam bidang keuangan, struktural, bahkan sampai kematian.

Kendala yang dihadapi Kodim 0609/Kab. Bandung selama proses tanggap darurat penanggulangan bencana alam antara lain: belum adanya sinergitas dalam kegiatan sosialisasi serta pelatihan secara menyeluruh. Dalam hal proses penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung yang seharusnya dilakukan oleh Kodim 0609/Kab. Bandung beserta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama dengan SKPD/instansi terkait tidak berjalan semestinya, sehingga hal ini menyebabkan kurang efektifnya pencapaian sasaran dalam penanggulangan bencana khususnya

bencana alam banjir yang terjadi di wilayah Kabupaten Bandung.

Kurang optimalnya fungsi komando Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung pada saat pemberian komando/perintah dan memonitor kegiatan tanggap darurat penanggulangan banjir di wilayah Kabupaten Bandung. Ketidaksiapan komando di lapangan turut mempengaruhi kegiatan pertolongan pertama kepada korban pada saat bencana banjir masih dilakukan kurang tepat dan cepat. Sebagai contoh pertolongan evakuasi warga dari rumah ke tempat pengungsian serta kelompok tanggap darurat kurang sigap dalam melakukan evakuasi. Wilayah geografis Kabupaten Bandung yang terkena bencana alam banjir tidak diimbangi dengan ketersediaan sarana dan prasarana untuk mengevakuasi korban. Warga mengalami kesulitan untuk menjangkau tempat pengungsian karena terbatasnya jumlah perahu karet.

Protap penanggulangan bencana alam yang belum disusun dengan baik menjadi salah satu kendala bagi Kodim 0609/Kab. Bandung dalam melaksanakan perbantuan kepada Pemerintah Daerah. Keberadaan Kodim 0609/Kab. Bandung hanya bersifat perbantuan sehingga tidak

memiliki kewenangan secara penuh dalam membuat keputusan di lapangan. Oleh karena itu dibutuhkan koordinasi dan kerjasama yang optimal antara beberapa pihak instansi terkait. Tingkat ego sektoral yang ada masih cukup tinggi menyebabkan kesulitan untuk mensinergikan dan berkoordinasi berkaitan dengan upaya penanggulangan bencana alam, berdampak kepada kegiatan penanggulangan bencana alam.

Dengan demikian tujuan penanggulangan bencana alam yang cepat, tepat, efektif, terpadu dan akuntabel belum dapat direalisasikan sebagaimana mestinya. Masyarakat belum mengetahui tindakan yang harus dilakukan ketika terjadi bencana. Sejauh ini, masyarakat masih kurang kepeduliannya untuk berpikir dan bertindak dalam menanggulangi bencana alam.

Walaupun bencana adalah sesuatu yang datang secara tidak terduga dan sulit untuk dicegah, namun terdapat cara-cara untuk mencegah agar dampak bencana tersebut dapat diminimalisir. Belum adanya Standar Operasional Prosedur tentang sistem peringatan dini bencana di beberapa kelurahan di Kabupaten Bandung. Telah diketahui bahwa untuk pencapaian efektivitas

penanggulangan bencana alam, dibutuhkan SOP sebagai pedoman dalam pelaksanaan suatu kegiatan. SOP tersebut sangat penting untuk memahami alur atau metode kerja yang harus dijalankan, memahami tingkat kesulitan dan kerumitan suatu pekerjaan, dan melihat fungsi dan pembagian tugas antar anggota yang terlibat.

SOP dapat digunakan sebagai pegangan dan arahan bagi masyarakat dan stakeholders dalam mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam karena dapat memberikan penjelasan bagaimana mekanisme suatu kegiatan dilakukan dan siapa yang akan melakukannya. Papan Jalur evakuasi dan titik kumpul memegang peranan yang sangat penting untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Kendala yang sering muncul adalah masyarakat tidak mengetahui prosedur evakuasi dengan baik, sehingga adanya kepanikan justru menjadikan mereka mengambil jalur yang salah atau bahkan malah mendekat ke sumber bahaya dan terpisah dengan keluarga.

Jalur evakuasi tersebut nantinya dapat merancang jalur mana yang cepat dan tidak macet untuk dilewati ketika bencana datang. Selain pemasangan papan jalur evakuasi, harus terdapat sosialisasi kepada masyarakat karena

dikhawatirkan masyarakat kurang memahami maksud dari papan jalur evakuasi dan titik kumpul tersebut.

### **Upaya Tanggap Darurat Bencana**

Manajemen bencana adalah sebuah proses yang terus menerus dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil dalam merencanakan dan mengurangi pengaruh bencana, mengambil tindakan segera setelah bencana terjadi serta mengambil langkah-langkah untuk pemulihan.<sup>10</sup>

Manajemen bencana adalah suatu proses dinamis, berlanjut dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi dan analisis bencana serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana.<sup>11</sup>

Manajemen bencana menurut Nurjanah sebagai Proses dinamis tentang bekerjanya fungsi-fungsi manajemen bencana seperti *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling*.<sup>12</sup> Cara kerjanya meliputi pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan tanggap darurat dan

pemulihan. Secara umum manajemen bencana dapat dikelompokkan menjadi 3 tahapan dengan beberapa kegiatan yang dapat dilakukan mulai dari pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.

Manajemen bencana adalah serangkaian upaya komprehensif dalam pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Kegiatan dalam pra bencana ditujukan untuk mengurangi resiko bencana, bersifat preventif seperti kegiatan Pencegahan dan Mitigasi. sedangkan dalam Kesiapsiagaan meliputi peringatan dini dan perencanaan saat bencana (tanggap darurat) yakni: Pengkajian darurat Rencana Operasi, Tanggap darurat dan pasca bencana, Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Upaya yang dilakukan Kodim 0609/Kab. Bandung dalam meningkatkan efektivitas tanggap darurat dengan menyiagakan pasukan dan logistik untuk mengantisipasi bencana alam banjir tahunan yang kerap terjadi di wilayah Kabupaten Bandung.

Dalam konteks bencana, penting untuk memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan yang efisien dan efektif sehingga jenis bantuan kemanusiaan yang sesuai dan relawan dapat mencapai ke lokasi korban dengan cepat dan tepat. Optimalisasi kinerja logistik bantuan

---

<sup>10</sup> Susanto, A.B., *Disaster Management di Negeri Rawan Bencana*, (Jakarta: Aksara Grafika Pratama, 2006), hlm. 10.

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

<sup>12</sup> Nurjanah, dkk., *Op.cit.*, hlm. 20-21.

kemanusiaan mengisyaratkan semua hubungan antara Kodim 0609/Kab.Bandung dan BPBD Kab. Bandung beserta instansi lain yang terlibat dalam penanggulangan bencana alam banjir dikelola melalui pendekatan terpadu secara efisien dan efektif.

Dalam mengkoordinasikan kinerja antar organisasi, menghilangkan redundansi, dan memaksimalkan efisiensi seluruh rantai pasok darurat sejumlah logistik seperti perahu karet, tempat penampungan air, dan perlengkapan lainnya, disiagakan menjelang musim hujan. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana secara terukur dilaksanakan berdasarkan kajian resiko bencana dengan parameter yang diperbarui secara berkala dan didukung dengan sistem informasi skala nasional. Pencapaian optimalitas penyelenggaraan upaya pencegahan dan mitigasi bencana mengacu kepada panduan teknis dan mekanisme standar yang telah disusun secara spesifik sesuai dengan karakteristik wilayah berdasarkan pemetaan daerah rawan bencana yang sudah dimiliki Kodim 0609/Kab. Bandung.

Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana difokuskan kepada optimalisasi strategi penyadaran publik untuk mengembangkan partisipasi

masyarakat dalam melaksanakan pencegahan dan mitigasi bencana. mengembangkan riset-riset terapan dengan kerangka kerja terstruktur yang mengarah kepada peningkatan rasio biaya manfaat dan selalu mempertimbangkan proses adaptasi pengetahuan di tatanan masyarakat pengguna hasil riset. Penataan ruang dan lahan pada sebagian besar daerah prioritas nasional berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air, tanah dan hutan sesuai dengan hasil kajian resiko bencana serta kajian lingkungan hidup strategis daerah dengan melakukan kerjasama bersama BPBD Kabupaten Bandung. Peningkatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana.

Kesiapsiagaan yang dilaksanakan Kodim 0609/Kab. Bandung diprioritaskan untuk membangun sistem peringatan dini bencana multi ancaman nasional yang terkoordinasi dengan prosedur standar yang telah disepakati oleh kementerian/lembaga terkait secara sistematis, terukur dan selalu dilatihkan secara berkala. Memperkuat tingkat pelayanan sistem peringatan dini bencana kepada masyarakat pengguna dengan mengembangkan alternatif moda penyebaran, strategi advokasi dan informasi publik, serta mekanisme latihan

bersama antara pemerintah dan masyarakat. Peningkatan kapasitas evakuasi, penyelenggaraan latihan kesiapsiagaan serta kemandirian mobilisasi sumberdaya masyarakat berdasarkan pedoman dan mekanisme standar yang disepakati.

Dalam proses pemilihan dan perencanaan lokasi pengungsian harus memenuhi standar-standar tertentu yaitu pemilihan lokasi yang tepat dan mampu untuk menampung jumlah warga yang diperkirakan akan mengungsi. Perencanaan lokasi memastikan tersedianya ruang yang cukup untuk rumah tangga dan mendukung keamanan serta kesejahteraan masyarakat.

Pemilihan dan perencanaan lokasi pengungsian memastikan tercukupinya kebebasan dan keamanan pribadi, seluruh anggota penduduk maupun korban bencana alam. Penampungan direncanakan dan dikelola sedemikian rupa sehingga meminimalisasi terjadinya kerusakan lingkungan. Di lokasi penampungan yang dijadikan sebagai tempat evakuasi korban bencana alam, perlu disediakan fasilitas-fasilitas berupa tenda tempat tinggal pengungsi, fasilitas kesehatan (rumah sakit lapangan), sanitasi, kebutuhan MCK dan lain-lain. Untuk itu perlu ditentukan terlebih

dahulu lokasi dari masing-masing fasilitas tersebut di area evakuasi.

## **Pembahasan**

### **Peran Kodim 0609/Kab. Bandung dalam tanggap darurat penanggulangan bencana alam**

Kodim 0609/Kab. Bandung dalam pelaksanaan penanggulangan bencana alam terutama pada saat terjadinya bencana, mekanisme yang dilakukan berpedoman pada Prosedur Tetap (Protap) Nomor : / R / Protap / 2014 tentang PRC PB sebagai petunjuk teknis pelaksanaan penanggulangan bencana di lapangan.

a. Penyelamatan dan evakuasi korban bencana alam.

Kodim 0609/Kab. Bandung dengan segala keterbatasan baik yang berkaitan dengan jumlah personel, kemampuan serta wawasan mengenai cara penanganan pertama terhadap korban bencana alam mempunyai peranan penting dalam melakukan kegiatan penyelamatan dan evakuasi terhadap korban ketika bencana terjadi. Kegiatan selanjutnya yaitu mengadakan pertolongan jika korban telah ditemukan yaitu menuju lokasi bencana bersama tim pencarian dengan terlebih dahulu mempelajari

batasan klasifikasi tiga wilayah penanggulangan yang telah ditetapkan, memberikan pertolongan pertama kepada korban bencana di tempat kejadian dan melaporkan kepada pihak selanjutnya yang menangani korban selanjutnya tindakan apa saja yang harus segera diberikan.

b. Penyiapan penampungan sementara

Penampungan sementara diberikan dalam bentuk tenda-tenda, barak, gedung fasilitas umum/sosial seperti : tempat ibadah, gedung olah raga, balai desa, dan sebagainya yang memungkinkan untuk digunakan sebagai tempat tinggal sementara. Tujuan dibangunnya penampungan sementara untuk mengamankan pengungsi dengan menjauhkannya dari tempat terjadinya bencana. Bangunan hunian sementara yang meliputi sarana dan prasarana hampir semuanya bersifat non permanen untuk menekankan fungsinya sebagai tempat tinggal pada masa transisi. Hal utama yang tidak boleh dilupakan dalam membangun penampungan sementara yaitu ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur, ketersediaan berbagai pelayanan, dan ketersediaan akses yang dilengkapi dengan MCK

dan sistem sanitasi yang memadai. Semua hal tersebut harus disesuaikan dengan budaya setempat.

c. Pengaturan dan pembagian logistik serta bahan makanan.

Kodim 0609/Kab.Bandung dengan sigap memberikan bantuan dalam hal pengaturan atau distribusi kepada korban bencana alam yang berkaitan dengan logistik. Hal ini dilakukan karena kadangkala bantuan logistik tidak tersalurkan secara merata dan tepat kepada korban bencana alam. Bantuan Logistik dibutuhkan untuk penanggulangan bencana alam khususnya pada saat terjadi bencana. Dukungan bantuan logistik harus tepat waktu, lokasi, sasaran, kualitas, kuantitas, dan kebutuhan.

d. Pengkajian lokasi bencana, kerusakan dan sumber daya.

Kodim 0609/Kab.Bandung melaksanakan pendataan berkaitan dengan korban, kerugian materiil, personel yang terlibat, materiil yang digunakan beserta peralatan berat maupun ringan yang digunakan selama melaksanakan bantuan bencana alam.

Sinergitas dan peran Kodim 0609/Kab.Bandung perlu diwujudkan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melalui kegiatan

sosialisasi serta pelatihan dengan merangkul pihak swasta. Namun pada kenyataannya, BPBD Kabupaten Bandung belum dapat melaksanakan fungsi ini secara maksimal. Hal ini karena BPBD Kabupaten Bandung belum dapat merumuskan wadah/sarana yang dapat mempertemukan semua elemen pendukung dalam persepsi yang sama dalam upaya penanggulangan bencana alam. Setiap instansi bergerak sesuai dengan tupoksinya masing-masing walaupun tujuannya sama yaitu melakukan penanganan dan tanggap bencana alam. Kondisi ini menjadikan setiap penanggulangan bencana alam menjadi kurang efektif dan efisien baik dari segi hasil maupun anggaran dana yang sudah dikeluarkan.

Tidak dapat diperoleh data yang akurat mengenai perkembangan pertolongan kepada korban karena setiap instansi menggunakan data-data internal dan tidak berbagi dengan instansi lain. Lebih lanjut, BPBD Kabupaten Bandung sulit dalam mengintegrasikan Program Pengurangan Resiko Bencana secara komprehensif karena belum memiliki dukungan penuh dari Pejabat daerah untuk mensinergikan program pengurangan resiko bencana alam tersebut.

Keadaan letak geografis Kabupaten Bandung yang menyebabkan bencana banjir terus menerus datang setiap musim menandakan perlunya intensitas dan komitmen tinggi dalam proses penanganan bencana alam. Hingga saat ini belum ditemukan adanya metode pendekatan dan penanggulangan yang ditempuh serta jalur-jalur komunikasi, dukungan logistik serta pengungsian yang direncanakan dengan baik. Ego sektoral yang masih tinggi pada setiap instansi menjadi penyebab koordinasi dan kerjasama menjadi sulit dilaksanakan pada saat tanggap darurat.

Dalam melaksanakan operasi penanggulangan bencana alam saat terjadi situasi tanggap darurat bencana di wilayah Kabupaten Bandung yaitu memberikan bantuan kepada Pemda, diantaranya mencari dan menyelamatkan korban, mengevakuasi korban dan menyalurkan bantuan kemanusiaan serta selalu siaga dalam situasi tanggap darurat yang diperkuat tersedianya dapur lapangan. Dalam jangka pendek, upaya-upaya yang dilakukan oleh Kodim 0609/Kab.Bandung berupa: menyusun Readlines Operation dan Prosedur Tetap (RO dan Protap) bersama antara Kodim 0609/Kab.Bandung, instansi Pemerintah Kabupaten Bandung serta lembaga-

lembaga lain yang memiliki kepedulian dalam penanggulangan bencana alam.

Dengan adanya RO dan Protap penanggulangan bencana banjir diharapkan setiap pihak dapat mengetahui peran dan tugas mereka masing-masing saat bencana alam terjadi dan dapat digunakan sebagai acuan indikator kedaruratan dalam penanggulangan bencana alam. Tahap berikutnya dilakukan evaluasi agar dapat diketahui dan dirumuskan adalah cara pengendalian yang lebih efektif mengingat kebutuhan dan kedaruratan bencana banjir di Kabupaten Bandung.

Melaksanakan edukasi kebencanaan sebagai upaya, metode, dan operasional untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, dan sikap positif masyarakat terhadap situasi kebencanaan sehingga memunculkan rasa ingin tahu dan sikap proporsional dalam menghadapi bahaya bencana. Hal ini bersifat urgensi karena selama ini masyarakat hanya diberikan peringatan jika terjadi bencana banjir datang tanpa adanya edukasi yang memadai mengenai langkah-langkah kesiapan dan prosedur menghadapi bencana banjir tersebut.

Edukasi kebencanaan memegang peranan penting untuk menyiapkan mental dan kesadaran masyarakat dalam

melakukan tindakan-tindakan cepat pada saat dan sesudah bencana terjadi. Edukasi juga dapat meminimalisir jumlah korban jiwa karena masyarakat dapat memperoleh pemahaman tentang penyelamatan jiwa saat terjadinya bencana alam.

Melakukan koordinasi dengan masyarakat, pihak swasta, LSM, dan Lembaga Nasional lainnya sebagai penguatan usaha penanggulangan bencana yang terus berkoordinasi, diberdayakan dan diusahakan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung ke depan. Jika semua komponen telah menyadari peran dan fungsinya masing-masing dalam usaha penanggulangan bencana, maka dasar penanggulangan bencana yang cepat dan tepat, koordinatif dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi, akuntabilitas, kemitraan, pemberdayaan, non-diskriminatif, serta non-proletisi (penyebaran agama dan keyakinan), dapat direalisasikan dengan benar.

Oleh karena itu dengan usaha penanggulangan bencana alam yang berdasarkan prinsip-prinsip yang benar, maka tujuan akhir dari usaha tersebut akan tercapai dengan baik. Baik pada konteks perlindungan kepada masyarakat maupun bagi ketentraman dalam



kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Membangun sistem peringatan dini. Sistem peringatan dini bencana merupakan elemen yang sangat penting dalam upaya pengurangan resiko bencana.

Dengan adanya peringatan dini bencana, maka masyarakat dapat melakukan respon yang sesuai untuk melakukan penyelamatan dan menghindari korban jiwa serta mengurangi dampak bencana tersebut. Agar sistem peringatan dini dapat berjalan secara efektif maka dibutuhkan partisipasi aktif masyarakat yang berada di daerah berisiko, memfasilitasi kegiatan-kegiatan penyadaran publik dan kesiapsiagaan masyarakat, serta penyampaian peringatan yang terpercaya.

Peringatan dini mencakup serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. Masyarakat memiliki hak untuk untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya serta berkewajiban untuk

memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana. Melakukan analisis atau kajian terhadap bencana yang terus terjadi di Kabupaten Bandung.

Mengadopsi dari penanganan manajemen bencana, maka perlu Kodim 0609/Kab.Bandung melaksanakan evaluasi terhadap bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Bandung sebagai informasi dalam menyusun peta kerawanan bencana yang dapat digunakan untuk menyiagakan wilayah dengan aparat teritorial yang lebih sigap dan tanggap. Data yang diperlukan dalam menyusun kajian ini dapat dilakukan oleh aparat teritorial, terdiri dari: Lokasi bencana (where), hal ini perlu diketahui sebagai dasar untuk perencanaan pelaksanaan penanggulangan bencana, hal tersebut dikarenakan bencana yang terjadi di perkotaan akan jauh berbeda kerugian atau kehilangan jiwa maupun hartanya dibanding dengan bencana yang terjadi di pedesaan.

Penyebab bencana (why), hal ini didapatkan melalui analisis lapangan. Waktu kejadian bencana (when), walaupun waktu kejadian yang tepat mungkin sulit diramalkan, namun dapat diperkirakan berdasarkan data historis, data seri dan data hasil pemantauan.

Bagaimana kejadian dari bencana (how), proses kejadian dan kronologi harus diketahui untuk dijadikan pembelajaran ke depannya.

Sedangkan untuk jangka panjang, upaya yang diharapkan segera terlaksana yaitu mendirikan media center. Media center berfungsi untuk memberikan kepastian informasi di antara banyaknya informasi simpang siur yang beredar di masyarakat.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

a. Peran dan tugas Kodim 0609/Kab.Bandung telah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan jabatan yang diembannya. Pengerahan bantuan Kodim 0609/Kab.Bandung dalam penanggulangan bencana alam tetap mengindik pada BPBD Kabupaten Bandung, tetapi sifatnya hanya penugasan. Keterlibatan Kodim 0609/Kab.Bandung ke depan dalam rangka membantu penanganan bencana alam perlu disiapkan dan disusun secara dini. Penataan Orgas diharapkan sudah terlepas dari fungsi militernya, sehingga personel yang

menjabat di BPBD lebih konsentrasi dan fokus pada tugasnya. Dengan demikian Kodim 0609/Kab.Bandung dapat berperan lebih dan mampu berbuat banyak dalam memelopori dan mendorong Pemerintah Daerah terkait permasalahan bencana alam.

b. Kendala yang dihadapi oleh Kodim 0609/Kab.Bandung selama proses tanggap darurat penanggulangan bencana alam antara lain: belum adanya sinergitas dalam kegiatan sosialisasi pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan proses penanggulangan bencana alam, kurang optimalnya fungsi komando pengendalian yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung, kurang tersedianya sarana dan prasarana untuk mengevakuasi korban bencana alam, protap penanggulangan bencana alam yang belum tersusun dengan baik, serta masih terdapatnya tingkat ego sektoral yang cukup tinggi. Upaya yang dilakukan Kodim 0609/Kab.Bandung dalam meningkatkan efektivitas tanggap darurat meliputi: menyiagakan pasukan dan logistik untuk mengantisipasi bencana, peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi

bencana, peningkatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana serta menentukan titik tempat pengungsian /penampungan. Langkah-langkah yang perlu segera dilakukan antara lain: Perlu adanya penguatan regulasi mengenai posisi dan peran strategis Kodim 0609/Kab.Bandung dengan disahkannya Peraturan Daerah (Perda) Bupati Bandung yang mengatur tentang pelaksanaan koordinasi penanggulangan bencana alam. Dengan adanya perda khusus tentang pelaksanaan penanggulangan bencana alam dapat memperjelas tugas dan fungsi masing-masing instansi terkait di setiap tahapannya baik dalam tahap pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Peningkatan pelaksanaan pembinaan, pelatihan dan sosialisasi secara keseluruhan diseluruh sesuai dengan Undang-Undang No 24 Tahun 2007. Setiap Satkorlak PBP dan Satlak PBP dilengkapi peralatan kontijensi serta personil yang mampu mengawaki sehingga pada saat terjadi bencana alam di daerah masing-masing peralatan tersebut dapat digunakan secara optimal. Peran serta dan partisipasi masyarakat yang diarahkan secara khusus pada daerah paling berisiko terkena bencana alam, untuk

terlibat secara aktif dalam pembangunan. Adanya pengkajian tentang Tugas Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana khususnya Peran Satkorlak dan BRR (Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi) sehingga dapat disinkronkan dengan Tugas TNI dalam rangka meminimalisir kendala-kendala yang terjadi di lapangan.

#### **Daftar Pustaka**

- A.B., Susanto. 2006. *Disaster Management di Negeri Rawan Bencana*, Jakarta: Aksara Grafika Pratama
- Harper, Erica. 2009. *International Law and Standard Applicable In Natural Disaster. Situation (Hukum Dan Standar Internasional Yang Berlaku Dalam Situasi*. Jakarta: Grasindo
- Hadi, Samsul. 2011. *Metode Riset Evaluasi*. Yogyakarta: Lakbang Grafika
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika
- Humaedi, M. Alie, dkk. 2016. *Etnografi Bencana; Menakar Peran Para Pemimpin Lokal dalam Pengurangan Resiko Bencana*), Yogyakarta: LkiS
- Karim, Silmy. 2014. *Membangun Kemandirian Industri Pertahanan Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Manullang. 2012. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia

- Moleong, Lexy J. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nurjanah, dkk. 2013. Manajemen Bencana. Bandung: Alfabeta
- P., Shergold, dkk. 2004. Connecting Government: Whole of Government Responses to Australia's Priority Challenges, dalam Canberra Bulletin of Public Administration edisi 112, hlm 11.
- Ramli, Soehatman. 2010. Pedoman Praktis Manajemen Bencana (Disaster Manajemen). Jakarta: Dian Rakyat.
- S. Priambodo, Arie. 2013. Panduan Praktis Menghadapi Bencana. Yogyakarta: Kansius
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Terry, George R. 2006. Prinsip-Prinsip Manajemen. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara